

ABSTRAK

A.Syahid Syamsul Hadi. “Pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dihubungkan dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”.

BPNT adalah peralihan dari Program Bantuan Beras Sejahtera ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program ini pernah beberapa kali berganti nama dari OPK kemudian menjadi raskin selanjutnya pada tahun 2016 beras raskin berubah nama menjadi beras sejahtera. Mekanisme penyaluran BPNT dilaksanakan melalui jaringan sistem elektronik. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan senilai Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan melalui kartu kombo/e-Walet. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sukabumi masih ditemukan banyak permasalahan diantaranya berkenaan dengan infrastruktur maupun non infrastruktur seperti ketersediaan barang, ketersediaan e-warong dan SDM pelaksana.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi, Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi dan Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dilakukan untuk menganalisa suatu permasalahan dalam penyaluran BPNT yang ada didalam penelitian dengan teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan yang menghasilkan argumentasi dan teori ilmiah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah; Tehnik pengumpulan dokumen, teknik wawancara dan *observasi*,. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa pelaksanaan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi pada awalnya dilakukan oleh BUMDES namun hal itu tidak sesuai dengan Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang BPNT. Kemudian setelah keluar surat dari Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, penyaluran BPNT secara bertahap dilakukan oleh E-Warong. Kendala yang dihadapi pada Pelaksanaan Penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi antara lain Ketersediaan infrastruktur seperti E-warong, Electronic Data Capture (EDC), pergantian kartu E-Wallet dan barang pangan, ketersediaan SDM dan kendala yang diakibatkan dari kondisi alam seperti cuaca tidak menentu dan akses jalan yang tidak memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi antara lain pemerintah melakukan penelusuran kasus dan/atau masalah yang terjadi di lapangan, mengadakan rapat koordinasi dengan semua *stakeholder* terkait di Kabupaten Sukabumi, melaksanakan penguatan jalur koordinasi dengan Pendamping BPNT, optimalisasi peran Organisasi Perangkat Daerah, melaksanakan sosialisasi tentang Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (PEDUM BPNT), mengoptimalkan peran Tim

Koordinasi (TIKOR), melakukan pemutakhiran data dan melaksanakan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kata Kunci: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kesejahteraan sosial, Kadudampit-Sukabumi

